



LKIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019



dinaslingkunganhidup.660@gmail.com



(0531) 32057



dislh@kotimkab.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud pelaksanaan kewajiban Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber dayanya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh instansi, sebagaimana telah digariskan di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi, visi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan Good Governance, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini mungkin belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan di masa mendatang sangat diharapkan.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja instansi bagi semua pihak yang berkepentingan. Diharapkan pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih dan peningkatan produktifitas di lingkungan instansi pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.



Sampit, Januari 2019

KEPALA DINAS,

Drs. H. SANG GUL LUMBAN GAOL, MT

REMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650403 198503 1 010

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Profil Kelembagaan	2
C. Tugas dan Fungsi SKPD	3
D. Struktur Organisasi	4
II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	9
C. Penetapan Kinerja	22
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	25
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	26
C. Akuntabilitas Keuangan	35
IV. PENUTUP	39

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa berlandaskan pada salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik (akuntabilitas), yang merupakan pertanggungjawaban dari amanah yang melekat pada suatu lembaga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menyajikan capaian kinerja selama tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi, dimana dalam Inpres 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan Akuntabilitas disamping Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini juga merupakan suatu titik tolak dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 7 (tujuh) sasaran dan 10 (Sepuluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan, secara keseluruhan Tingkat capaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai **86,58 %** termasuk dalam kategori **BERHASIL**.

Kiranya Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin, Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

BAB. I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pembangunan Lingkungan Hidup sejauh ini memiliki Kontribusi yang besar terhadap pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur, Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang harus didasari pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Keadaan yang demikian diperlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Hal ini diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat dan konsekuen.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan mengemban tugas yang amat berat dalam pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kegiatan lintas sektor dan menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Di tingkat daerah pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup melibatkan banyak instansi, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat luas. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan memerlukan koordinasi yang mantap.

Secara umum bahwa pelaksanaan tugas rutin dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 ini telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang melekat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur. Namun demikian masih banyak tugas-tugas pembangunan yang belum dapat diselesaikan, karena kompleksnya permasalahan yang menghambat penyelesaian tugas-tugas pembangunan ini.

B. Profil Kelembagaan

Dengan berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Badan Lingkungan Hidup berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur maka struktur organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas :
 - a. Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengurangan Sampah;
 - b. Seksi Penanganan Sampah
 - c. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas;
 - a. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - c. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
6. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas;
 - a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - b. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
7. UPTD Laboratorium Lingkungan
8. UPTD Persampahan

C. Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 21 Desember 2016 mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penuatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Perencanaan program bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pengekoordinasian kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Perencanaan Lingkungan Hidup berupa RPPLH Kabupaten dan KLHS Kabupaten;
- b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten;
- c. Pengelolaan Kehati kabupaten;

- d. Pengelolaan Limbah B3 meliputi penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten;
- f. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten dan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten;
- g. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten;
- h. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- i. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten serta usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Kabupaten;
- j. Pengelolaan sampah, proses dan / atau penerbitan izin pendaurulangan sampah / pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

D. Struktur Organisasi

Sesuai tugas pokok dan fungsinya selanjutnya dijabarkan pula bahwa susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Persampahan.

Aspek Strategis Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

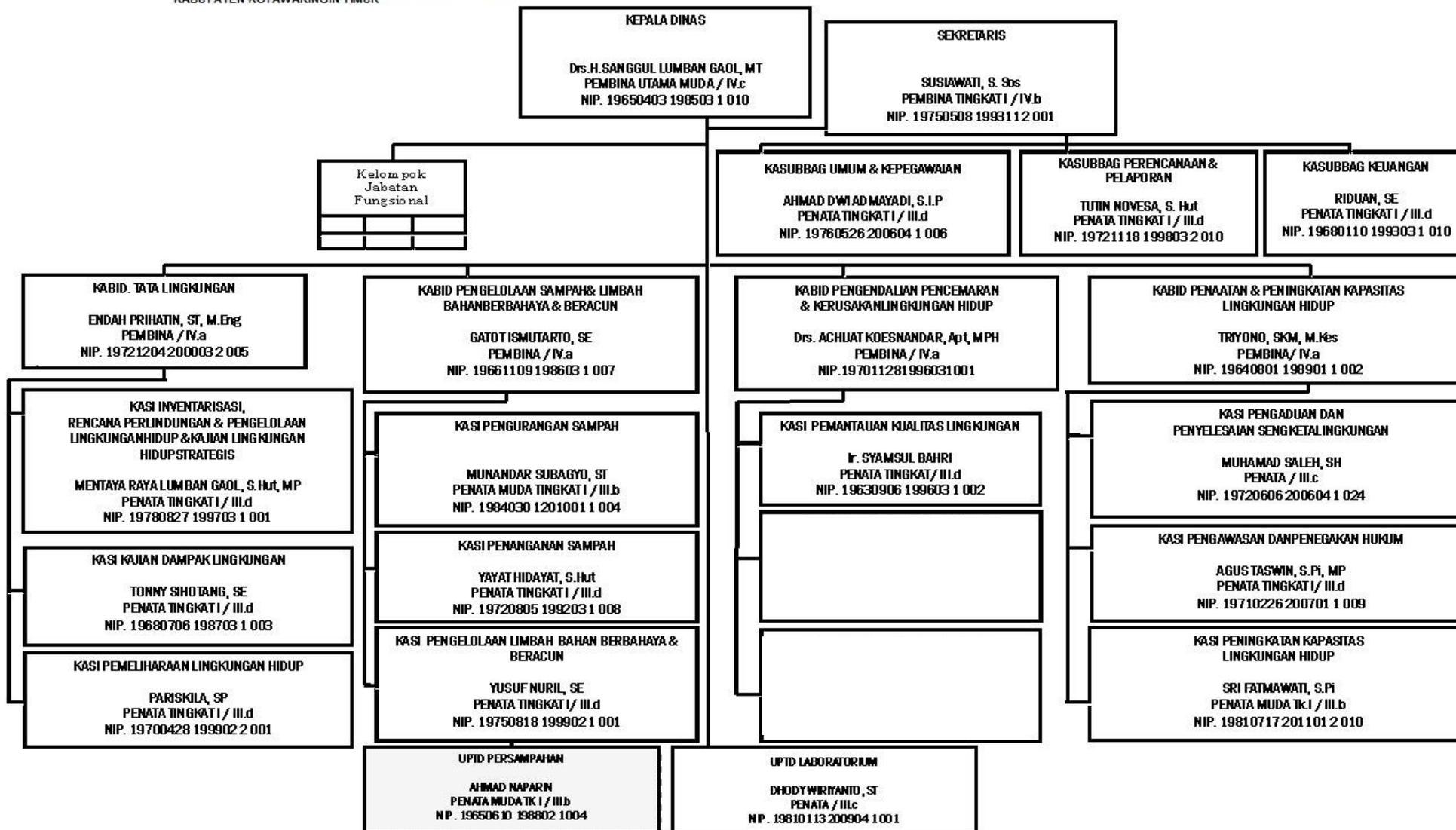
perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU 32 Tahun 2009).

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan fungsi lingkungan hidup tidak sesuai dengan peruntukannya.

Jenis usaha/kegiatan di Kabupaten Kotawaringin Timur baik sektor industri, perkebunan, perikanan maupun sektor lainnya telah berkembang sangat pesat. Perkembangan ini memberikan dampak positif antara lain berupa kenaikan PAD, transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, selain memberikan dampak yang positif ternyata perkembangan di sektor jenis usaha/kegiatan juga memberikan dampak yang negatif, yaitu meningkatnya resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat limbah yang terbuang. Apabila lingkungan tidak dikelola dengan baik melalui instrument perencanaan dan pelaksanaan, maka akan mengganggu keseimbangan lingkungan dimana beban limbah akan melebihi daya dukung lingkungan, sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak dapat tercapai.

Aspek strategis untuk urusan lingkungan hidup antara lain :

1. Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan hidup
2. Masih adanya pemilik kegiatan/usaha yang belum peduli dalam pengelolaan lingkungan terutama yang menghasilkan limbah.
3. Upaya pengelolaan lingkungan hidup semakin berat dan kompleks, berbagai upaya yang telah dilakukan masih terasa belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Tingkat pencemaran dan kerusakan yang telah terjadi belum sebanding dengan tingkat keberhasilan kita dalam melakukan usaha perbaikan lingkungan.
4. Banyaknya perubahan terhadap lingkungan hidup akibat aktivitas masyarakat yang terus meningkat tanpa mempedulikan keadaan lingkungan.



BAB. II PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

Di dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Instansi sebagai berikut :

VISI

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan pembangunan adalah :

“ Terwujudnya peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan “.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2021 dapat dirumuskan sesuai dengan misi Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

Misi 2 : Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Misi yang merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur telah disesuaikan dengan

arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup nasional, dengan memperhatikan azas kepentingan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Mendorong terlaksananya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan masyarakat setempat.
2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengawasan, pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Meningkatkan peran serta stake holder dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sumber daya alam dan energi;
4. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan.
5. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial DAS.

TUJUAN

Tujuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

SASARAN

Sasaran umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian serta kinerja masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan;
2. Meningkatnya pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan usaha yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan;
3. Terkelolanya Pelestarian, konservasi, dan Pemanfaatan sumber daya Hayati dan ekosistemnya;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah;

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
6. Meningkatnya promosi atas potensi pada bidang Lingkungan Hidup.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Menurut Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2012, Rencana Kinerja Tahunan ini disebut Rencana Kerja SOPD disingkat Renja SOPD.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-						
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Mewujudkan Kota Sampit yang Bersih dan Sehat		Peningkatan Persentase Penanganan Sampah	-	62.00 %	62.00 %	63.00 %	64.00%		
		1.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian serta kinerja masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1.	Persentase sampah yang dikelola secara landfill	-	59%	58%	57%	56%
				2.	Persentase sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle (3R)	-	3%	4%	6%	8%
2	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	70.45	71.47	72.15	73.14		
		2.	Meningkatnya pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap	1.	Jumlah sungai utama kualitas airnya memenuhi status mutu kelas II	-	16 Sungai	16 Sungai	18 Sungai	18 Sungai

			usaha atau kegiatan usaha yang mencemari dan merusak lingkungan	2.	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	-	1 Titik Pantau	3 Titik Pantau	4 Titik Pantau	4 Titik Pantau
		3.	Terkelolanya Pelestarian, konservasi, dan Pemanfaatan sumber daya Hayati dan ekosistemnya	1.	Persentase pelaksanaan pengelolaan kawasan ekowisata	-	0.3	0.82%	1.65%	1.65%
				2.	Persentase luasan penanaman daerah konservasi	-	20%	30%	40%	50%
		4.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.	Persentase RTH Kota yang Dikelola	-	-	15%	20%	20%
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%
		5.	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	1.	Persentase pelayanan yang terpenuhi sesuai NSPK	-	100%	100%	100%	100%
		6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1.	Nilai AKIP	-	100%	100%	100%	100%
4	Penguatan promosi potensi bidang Lingkungan Hidup			1.	Persentase masyarakat yang mengetahui potensi bidang Lingkungan Hidup	-	100%	100%	100%	100%
		7.	Meningkatnya promosi atas potensi pada bidang Lingkungan Hidup	1.	Persentase Informasi yang dipromosikan	-	100%	100%	100%	100%

Komponen Rencana Kinerja

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang:

- a) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;
- b) indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya;
- c) program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Adapun komponen rencana kinerja meliputi:

1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

4. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan (Tahun)						Kondisi Kinerja akhir periode
		1	2	3	4	5	6	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah di perkotaan yang terkelola	58.85%	58.85%	58%	57%	56%		
Kegiatan Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah tersusunnya dokumen pengelolaan persampahan	0	4 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0	-	1 Dok.
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Jumlah peserta kegiatan teknis persampahan untuk masyarakat	25 Orang	0	20 Orang	0	20 Orang	20 Orang	0
Bimbingan teknis persampahan	Jumlah peserta bimtek persampahan	25 Orang	50 Orang	50 Orang	0	25 Orang	25 Orang	15 Orang
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	30 Orang	175 Orang	100 orang	0	30 Orang	30 Orang	365 Orang
Sosialisasi Bank Sampah	Jumlah peserta sosialisasi Bank Sampah	30 Orang	80 Orang	50 Orang	0	25 Orang	25 Orang	185 Orang
Pemeliharaan Kebersihan Kota	Terlaksananya rotasi armada pengangkutan sarana sampah secara maksimal	78 M3	78 M3	78 M3	78 M3	78 M3	78 M3	468 M3
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Kota	Terpenuhinya sarana dan prasarana kebersihan kota	0	21 Unit	134 Unit	134 Unit	383 Unit	383 Unit	1055 Unit
Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA	Volume sampah terangkut (m3)	78 M3	60,50 M3	58 M3	57 M3	56 M3	56 M3	47,75 M3
Pelaksanaan dan Pemeliharaan TPA	Timbunan sampah di TPA	77,22 M3	76,44 M3	74,88 M3	73,32 M3	71,76 M3	71,76 M3	443,82 M3

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase upaya pengendalian perusakan lingkungan hidup	45,62%	50%	55%	60%	65%		
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah kegiatan pembinaan Adipura	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	6 Kali
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kepedulian dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan Hari Lingkungan dan Hari Sampah Nasional	0	2 Kali	2 Kali	0	2 Kali	2 Kali	10 Kali
Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Kepedulian terhadap LH di Sekolah	Jumlah kegiatan Pembinaan Sekolah (Adiwiyata)	0	10	10	10	10	10	40
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase upaya pengendalian perusakan lingkungan hidup	45,62 %	50%	55%	60%	65%		
Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik sampel untuk informasi nilai IP dan nilai ISPU	18 Titik	20 Titik	21 Titik	23 Titik	25 titik	25 titik	134 Titik
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang LH	15	15	15	15	15	15	90
Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek pengelolaan B3 dan LB3	0	30	0	0	0	0	30
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi	0	0	0	20	0	0	75
Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Jumlah sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti	50 %	60 %	70 %	100 %	95 %	95 %	78 %

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Upaya Perlindungan dan konservasi Terhadap Sumber daya Alam	0%	0%	60%	65%	70%		
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber Sumber Air	Jumlah lokasi pembuatan Biopori	0	2	2	0	0	0	4
Peningkatan Peran Serta Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Dalam Pengelolaan Konservasi SDA	Jumlah perusahaan yang diinventarisir ttg pelaksanaan konservasi sumber daya alam pada perkebunan kelapa sawit	5	5	5	5	5	5	30
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah dokumen masyarakat hukum adat (MHA)	0	0	0	10	10	10	30
Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase Jumlah Parameter yang Terakreditasi	10%	20%	30%	40%	50%		
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah lokasi pengujian emisi/polusi akibat aktivitas industri	4	6	10	0	0	0	20
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Jumlah lokasi pengujian limbah cair dan pengujian tanah produksi biomassa	13	15	17	0	0	0	45
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Jumlah pelaku usaha yang berpotensi yang mencemari lingkungan	0	0	0	5	5	5	
Operasional Laboratorium	Jumlah parameter pengujian air, udara dan tanah yang mampu diuji	0	0	0	1	3	3	7

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah	0%	21%	36%	50%	100%		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pengelolaan limbah tinja	NA	7 Paket	3 Paket	0	0	0	10 Paket
Rehabilitasi/peeliharaan sarana dan prasarana air limbah	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	NA	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Persentase Pelaksanaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	0	0	0	100%	100%		
Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Persentase Pelaksanaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	0	0	0	100%	100%	100%	50%
Program Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah	Jumlah Luasan Penanaman Bambu Pada kanan Kiri Sungai	0	0	0	50 Ha	50 Ha		
Penanaman Bambu di Kanan Kiri Sungai	Jumlah Luasan Penanaman Bambu Pada kanan Kiri Sungai	0	0	0	50 Ha	50 Ha	50 Ha	150 Ha
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	1	1	1		3		3
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah Lokasi kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	0	0	25	0	25	25	50

Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah data dan informasi yang dikelola	0	0	0	0	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.
Mengikuti Pameran di Pusat	Jumlah kegiatan yang diikuti pameran hari lingkungan hidup di Jakarta	1 Kali	1 Kali	0	0	1 Kali	1 Kali	4 Kali
Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kelompok /Masyarakat Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0	15 Titik Hotspot	0	0	0		
Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Jumlah kelompok / masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan	0	0	0	30 Orang	30 Orang	30 Orang	90 Orang
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah titik hotspot yang berkurang	0	15 Titik Hotspot	0	0	0	0	15 Titik Hotspot
Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Persentase pengelolaan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	0%	50%	55%	60%	65%		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Jumlah masyarakat yang peduli lingkungan hidup	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	18 Orang
Program Penyuluhan dan Penataan Hukum/Perundangan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perlindungan dan pengelolaan lingkungan	0%	0%	100%	100%	100%		
Sosialisasi Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha	0	30 Orang	0	0	20 Orang	20 Orang	7 Orang

Pembuatan Kajian dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kajian dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	0	1 Dok.	0	0	1 Dok.
Kajian/Studi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Bidang LH	Jumlah dokumen yang dihasilkan	0	0	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	3 Dok.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	0	0	0	12 Unit	12 Unit		12 Unit
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Jumlah Sarana dan prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit
Program Pengembangan Ekosiwisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Jumlah Luasan pelaksanaan KHDTK Kebun Raya dan Hutan Kota	0 Ha	1 Ha	2 Ha	5 Ha	10 Ha		
Penetapan Taman Hutan Raya (TAHURA)	Jumlah lokasi yang ditetapkan	0	1 Lok.	0	0	0	0	0
Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)	Jumlah Luasan Pelaksanaan Taman Hutan Raya	0	0	6400 Ha	0	0	0	800 Ha
Perencanaan Hutan Kota dan Kebun Raya	Jumlah lokasi yang ditetapkan	0	2 Lok.	2 Lok.	0	0	0	2 Lok.
Pengelolaan KHDTK Kebun Raya	Jumlah luasan KHDTK Kebun Raya yang terkelola	0	1 Ha	2 Ha	5 Ha	0	0	28 Ha
Taman Hutan Raya (TAHURA)	Jumlah Luasan TAHURA yang terkelola				400 Ha	400 Ha	400 Ha	

KHDTK Kebun Raya	Jumlah luasan KHDTK Kebun Raya yang dikelola					10 Ha	10 Ha	
Program Penanaman Pohon pada Lahan di Luar Kawasan	Jumlah Pengadaan Bibit	0	0	0	169.500 Bibit	169.500 Bibit		169.500 Bibit
Pembibitan (DBH-DR)	Jumlah bibit yang diadakan	0	0	0	169.500 Bibit	169.500 Bibit	169.500 Bibit	169.500 Bibit
Program Pengukuhan Kawasan Hutan	Jumlah Kecamatan Pengukuhan Kawasan Hutan	0	4 Kec.	13 Kec.	0	0		
Penataan Batas Kawasan Hutan	Jumlah Kecamatan Pengukuhan Kawasan Hutan	0	4 Kec.	13 Kec.	0	0	0	
Sosialisasi Pengukuhan Kawasan Hutan	Jumlah Kecamatan kegiatan sosialisasi pengukuhan Kawasan Hutan	0	4 Kec.	13 Kec.	0	0	0	
Program Penghijauan	Jumlah Luasan Penanaman Kawasan Konservasi	0	1 Hektar	2 Hektar	5 Hektar	10 Hektar		
Pembibitan dan Konservasi Tanaman Penghijauan	Jumlah Luasan Penanaman Kawasan Konservasi	0	1 Hektar	2 Hektar	5 Hektar	10 Hektar	10 Hektar	38 Hektar
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH kota dengan kondisi baik	0	0	0	100%	100%		
Kegiatan Penataan RTH	Persentase RTH kota dengan kondisi baik	0	0	0	100%	100%	100%	50%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%		
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dilayani setahun	600 Surat	600 Surat	600 Surat	600 Surat	600 Surat	600 Surat	3000 Surat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bidang yang di Layani setahun	4 Bidang	6 Bidang	7 Bidang	7 Bidang	7 Bidang	7 Bidang	32 Bidang

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bidang yang dilayani pertahun	4 Bidang	6 Bidang	7 Bidang	7 Bidang	7 Bidang	7 Bidang	32 Bidang
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	4 Laporan	7 Lap.	32 Lap.				
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor yang diperlukan	0	12 Jenis	12 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	4 Bidang	7 Bidang	7 Bidang				
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	5 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	35 Jenis
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen yang disediakan	5 Jenis	8 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	36 Jenis
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan	2 Jenis	0	0	0	6 Jenis	6 Jenis	14 Jenis
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	3.650 eks.	4.745 eks.	3.650 eks.	3.650 eks.	3.650 eks.	3.650 eks.	20.812 Jenis
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan yang dilengkapi makan/minum	6 Keg.	6 . Keg.	6 Keg.	6 Keg.	6 Keg.	6 Keg.	30 Keg.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi /konsultasi yang difasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi yang difasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%		
Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	6 Unit	6 Unit	36 Unit				

Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	5 Unit	6 Unit	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	19 Unit
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dibeli	6 Buah	6 Buah	3 Buah	6 Buah	6 Buah	6 Buah	38 Buah
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dibeli	5 Buah	8 Buah	3 Buah	3 Buah	6 Buah	6 Buah	35 Buah
Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	0	0 Buah	4 Buah	0	0	0	4 Buah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan Gedung kantor yang dipelihara	320 M2	320 M2	11.664 M2	11664 M2	320 M2	320 M2	24.928 M2
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit				
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	23 Unit	23 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0	0	206 Unit	0	0	0	206 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	1 Jenis	0	5 Jenis	5 Jenis	29 Jenis
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	0	1 Unit	1 Unit	0	0	0	2 Unit
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Unit gedung kantor yang direhabilitasi	0	7 Unit	0	2 Unit	1 unit	1 unit	10 Unit
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Jumlah pegawai yang diadakan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	100%	100%	100%	100%		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan/dibeli	30 Stel	30 Stel	94 Stel	0	90 Stel	90 Stel	334 Stel
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian yang disediakan/dibeli	30 Stel	0	90 Stel	0	90 Stel	90 Stel	390 Stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti Diklat formal	100%	100%	100%	100%	100%		
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	30 Orang	4 Orang	4 Orang	15 Orang	15 Orang	83 Orang
Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD		100%	100%	100%	100%		
Pembinaan penyusunan program dan anggaran kegiatan APBD Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	NA	6 Dok.	6 Dok.	6 Dok.	0	0	6 Dok.
Pelaporan kegiatan APBD Kabupaten	Jumlah dokumen pelaporan kegiatan APBD Kabupaten	NA	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	0	0	5 Dok.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	100%	100%		100%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	0	0	0	0	10 Dok.	10 Dok.	10 Dok.
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	0	0	0	0	2 Dok.	2 Dok.	4 Dok.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	0	0	0	0	1 Dok.	1 Dok.	2 Dok.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	0	0	0	0	1 Dok.	1 Dok.	2 Dok.
Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentasi Informasi Edukasi Tentang Lingkungan yang di Publikasikan	100%	100%	100%	100%	100%		100%

Pelaksanaan Sampit Expo	Persentasi Informasi Edukasi Tentang Lingkungan yang di Publikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------

C. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. Pihak-pihak yang terlibat didalam penetapan kinerja dalam konsep ini baru meliputi Menteri/Gubernur kepada Presiden, pejabat eselon I kepada Menteri, Bupati/Walikota kepada Gubernur, dan pejabat eselon II kepada pejabat eselon I/Bupati/Walikota.

Perjanjian Kinerja dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya; percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel; meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; untuk dapat menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan (reward/sanksi).

Penetapan kinerja memuat dua unsur pokok yaitu 1). Pernyataan Penetapan Kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggung jawab program dengan atasan langsung dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Bupati Kotawaringin Timur dan 2). Lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja yaitu; konsistensi, keselarasan dan proporsionalitas dalam menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ke dalam penetapan prioritas program/kegiatan dan alokasi anggaran; ketepatan dalam merumuskan sasaran-sasaran strategis dan indikator kinerja; ketepatan dalam mengestimasi target kinerja dari setiap indikator kinerja ; Obyektivitas dalam pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Pasal 5, ditetapkan bahwa Dokumen Penetapan Kinerja SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan Bupati/Walikota sesudah ditetapkannya DPA SKPD.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian serta kinerja masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Persentase sampah yang dikelola secara landfill	57 %
		2. Persentase sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle (3R)	6 %
2.	Meningkatnya pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha atau kegiatan usaha yang mencemari dan merusak lingkungan	1. Jumlah sungai utama kualitas airnya memenuhi status mutu kelas II	18 Sungai
		2. Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	4 Titik Pantau
3.	Terkelolanya Pelestarian, konservasi, dan Pemanfaatan sumber daya Hayati dan ekosistemnya	1. Persentase pelaksanaan pengelolaan kawasan ekowisata	0,82 %
		2. Persentase luasan penanaman daerah konservasi	40 %
4.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Persentase RTH Kota yang Dikelola	15%
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	1. Persentase pelayanan yang terpenuhi sesuai NSPK	100%
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Nilai AKIP	100%
7.	Meningkatnya promosi atas potensi pada bidang Lingkungan Hidup	1. Persentase Informasi yang dipromosikan	100 %

No.	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.693.099.440,-	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.936.113.780,-	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36.000.000,-	APBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	94.646.000,-	APBD
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.165.678.180,-	APBD
6.	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	30.000.000,-	APBD
7.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	663.532.500,-	APBD
9.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	71.810.000,-	APBD
10.	Program peningkatan pengendalian polusi	204.871.600,-	APBD
11.	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan - Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	1.252.150.000,-	APBD
12.	Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	67.400.000,-	APBD
13.	Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	43.577.0000,-	APBD
14.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	199.130.000,-	APBD
15.	Program Penyuluhan dan Penataan Hukum/Perundangan Lingkungan Hidup	0,-	APBD
16.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	131.480.000,-	APBD
17.	Program Penanaman Bambu pada Kiri Kanan Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah	1.145.050.000,-	DBH-DR
18.	Program Pengadaan Pembangunan Konservasi Tanah dan Air	603.050.000,-	DBH-DR
19.	Penanaman Pohon pada Lahan di Luar Kawasan	2.856.164.800,-	DBH-DR
20.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	1.360.950.000,-	DBH-DR
21.	Program Penghijauan	45.000.000,-	APBD
Jumlah		26.597.203.300,-	

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA



A. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan ini mengungkap Capaian kinerja Sasaran.

Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya berhasil diwujudkan pada tahun 2019 ini.

Dalam Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kerjanya, ditetapkanlah Nilai pencapaian kinerja yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori capaian berdasarkan rata-rata atas indikator kinerja sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori capaian
I	95 % - 100 %	Sangat Berhasil
II	80 % - 95 %	Berhasil
III	50 % - 80 %	Cukup Berhasil
IV	0 % < 50 %	Kurang Berhasil

Berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian serta kinerja masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Sampah yang dikelola secara Landfill	57%	57,33%	101
	Persentase sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle (3R)	6%	9,15%	152,5
Meningkatnya pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan usaha yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan	Jumlah sungai utama kualitas airnya memenuhi status mutu kelas II	18 Sungai	18 Sungai	100
	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	4 titik Pantau	4 Titik Pantau	100
Terkelolanya Pelestarian, konservasi, dan Pemanfaatan sumber daya Hayati dan ekosistemnya	Persentase pelaksanaan pengelolaan kawasan ekowisata	1,65%	1,58%	96
	Persentase luasan penanaman daerah konservasi	40%	1,99%	5
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota yang dikelola	20%	2,26%	11,3
Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan yang terpenuhi sesuai NSPK	100%	100%	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	100%	100%	100
Meningkatnya promosi atas potensi pada bidang Lingkungan Hidup	Persentase Informasi yang dipromosikan	100%	100%	100

B. Analisis Atas Pencapaian Kinerja

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 7(tujuh) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan .

Analisis akuntabilitas kinerja merupakan suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan yang menyajikan data dan informasi

relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas tersebut diuraikan dibawah ini.

1 *Meningkatnya kesadaran dan kepedulian serta kinerja masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup*

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan program dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, semakin tingginya persentase sampah yang dikelola secara Landfill maka akan semakin banyak sampah yang telah tertangani di perkotaan, demikian pula halnya dengan semakin tingginya Persentase sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle (3R) maka akan semakin banyak sampah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis I				
<i>Meningkatnya kesadaran dan kepedulian serta kinerja masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</i>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase Sampah yang dikelola secara Landfill	57%	57,33%	101
2	Persentase sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle (3R)	6%	9,15%	152,5
Capaian Sasaran				126,75

Pencapaian Sasaran diperoleh melalui 2 (dua) Program, dan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Pemeliharaan Kebersihan Kota
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Kota
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA
 - Pelaksanaan dan Pemeliharaan TPA
 - Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup :

- Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup di Sekolah
- Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Wujud nyata dari penanganan sampah diperkotaan pada tahun 2019 ini Dinas Lingkungan Hidup telah dengan menutup beberapa TPS yang berada dipinggir jalan dan mengaktifkan 3 (tiga) Unit bangunan DEPO , 3(tiga) Unit bangunan DEPO mini serta 1 (satu) Unit bangunan TPS 3R sebagai wadah pembuangan sampah rumah tangga . Dengan menutup sebagian besar TPS yang berada dipinggir jalan, diharapkan kebersihan di lokasi sekitar lebih terjaga dan sampah-sampah tidak lagi terlihat berhamburan dipinggir jalan.

Perbandingan realisasi kinerja sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	
1	Persentase Sampah yang dikelola seccara Landfill	%	57,35	58,68	57,33%
2	Persentase sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle (3R)	%	0,92	0,92	9,15%

2 *Meningkatnya pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha atau kegiatan usaha yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan.*

Sasaran ini dimaksudkan untuk meminimalisir potensi pencemaran dan pengrusakan lingkungan melalui udara dan air dengan melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan masyarakatan sekitar.

Untuk Mengukur Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau memenuhi baku mutu Metode yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Kotawaringin Timur adalah Passive Sampler dengan lama pengambilan sample 14 (empat belas) hari pada 4 (empat) titik pantau yang terpasang pada:

- Perumahan (Perumahan Pandawa)
- Industri (Pelabuhan Multi Purpose) Pelindo-Bagendang
- Transportasi (Depo Pelita)
- Perkantoran (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur)

Pencapaian Sasaran ini diperoleh melalui 5 (lima) Program yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yang meliputi :

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
 - Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - Pengadaan Peralatan untuk Uji Kualitas Air dan Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Merkuri .Untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan untuk Uji Kualitas Air dan Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Merkuri di peroleh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan.
- b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan :
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah
- c. Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi, dengan Kegiatan :
 - Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
 - Penyediaan Barang dan Jasa Laboratorium
- d. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, dengan kegiatan :
 - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
- e. Program Peyuluhan dan Penataan Hukum/ Perundangan Lingkungan Hidup, dengan Kegiatan :
 - Pembuatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut

:

Sasaran Strategis 2				
<i>Meningkatnya pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan usaha yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan</i>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah sungai utama kualitas airnya memenuhi status mutu kelas II	18 sungai	18 Sungai	100
2	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	4 titik Pantau	4 Titik Pantau	100
Capaian Sasaran				100

Perbandingan realisasi kinerja sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	
1	Jumlah sungai utama kualitas airnya memenuhi status mutu kelas II	Sungai	16	16	18
2	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	Titik Pantau	4	4	4

3 *Terkelolanya Pelestarian, konservasi, dan Pemanfaatan sumber daya Hayati dan ekosistemnya.*

Terkelolanya Pelestarian, konservasi, dan Pemanfaatan sumber daya Hayati dan ekosistemnya merupakan salah satu bentuk keinginan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kelestarian Lingkungan melalui kawasan ekowisata yang dapat membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan, kearifan local dan pelestarian budaya masyarakat setempat. Pelestarian budaya local dan kearifan local secara tak langsung juga menumbuhkan jati diri dan rasa bangga diantara penduduk setempat.

Selain itu pula penanaman pada daerah Konservasi yang merupakan salah satu upaya Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam , meskipun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dibandingkan luasan kawasan yang dikelola.

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 3				
<i>Terkelolanya Pelestarian, konservasi, dan Pemanfaatan sumber daya Hayati dan ekosistemnya</i>				
No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase pelaksanaan pengelolaan kawasan ekowisata	1,65	1,58	96
2	Persentase luasan penanaman daerah konservasi	40	1,99	5
	Capaian Sasaran			50,5

Pencapaian Sasaran ini diperoleh melalui 2 (dua) Program dan 2(dua) Kegiatan yaitu :

1. Program Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan - Kawasan Konservasi Laut dan Hutan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Pengelolaan KHDTK Kebun Raya
2. Program Penghijauan, dengan kegiatan :
 - Pembibitan dan Konservasi Tanaman Penghijauan

Perbandingan realisasi kinerja sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	
1	Persentase pelaksanaan pengelolaan kawasan ekowisata	%	15	20	1,58
2	Persentase luasan penanaman daerah konservasi	%	15	20	1,99

4 *Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)*

Tujuan pembangunan RTH pada prinsipnya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah kota, lebih lanjut tujuan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lebih kepada adalah:

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.
- b. Mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur berupaya untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi ekologis, yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan satu bentuk Ruang Terbuka Hijau yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti Ruang Terbuka Hijau untuk perlindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. Ruang Terbuka Hijau untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan Ruang Terbuka Hijau pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota .

Pencapaian Sasaran ini diperoleh melalui Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau.

Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini baru dilaksanakan pada tahun 2019 ini dimaksudkan dapat menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mengutamakan lahan yang Clear and Clean dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 4				
<i>Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase RTH yang dikelola	20 %	2,26%	11,3
	Capaian Sasaran			11,3

Perbandingan realisasi kinerja sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	
1	Persentase RTH yang dikelola	%	-	-	2,26

5 *Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah*

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 5				
<i>Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah</i>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase pelayanan yang terpenuhi sesuai NSPK	100	100	100
	Capaian Sasaran			100

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator kinerja yang diukur dari terlaksananya (empat) Program Rutin, yaitu:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Perbandingan realisasi kinerja sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pelayanan yang terpenuhi sesuai NSPK	%	100	100	100

6 *Meningkatnya akuntabilitas kinerja*

Pencapaian Sasaran ini dapat diperoleh melalui 1 (satu) Program dan 2(dua) Kegiatan yaitu Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan penyusunan program dan anggaran kegiatan APBD Kabupaten
- Pelaporan kegiatan APBD Kabupaten

Indikator dan capaian kinerja yang dicapai dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 6				
<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja</i>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Nilai AKIP	Dokumen	1	100
Capaian Sasaran				100

Perbandingan realisasi kinerja sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
1	Nilai AKIP	dokumen	1	1	1

7 Sasaran Strategis “Meningkatnya promosi atas potensi pada bidang Lingkungan Hidup”.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang capaian kinerja dan terlaksananya penyelenggaraan informasi yang dipromosikan/pameran investasi. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 7				
<i>Meningkatnya promosi atas potensi pada bidang Lingkungan Hidup</i>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase Informasi yang dipromosikan	%	100	100
Capaian sasaran				100

Perbandingan realisasi kinerja sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Informasi yang dipromosikan	Kegiatan	1	1	1

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Secara umum total Pagu anggaran sebesar **Rp. 31.530.028.850,-** dengan perincian sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 4.932.825.550,-**

B. Belanja Langsung sebesar **Rp. 26.597.203.300,-**

Dari total anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2019 terealisasi sebesar **Rp. 29.882.147.987,- (fisik 98,62 %)**.

Pagu dan realisasi anggaran untuk setiap kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dirinci sebagai berikut :

**PROGRAM / KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2019**

SOPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			KET
			KEUANGAN		FISIK (%)	
			(Rp.)	(%)		
1	3	5	10	11	12	13
	BELANJA	31.530.028.850	29.882.147.987	95,14	98,62	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.932.825.550	4.576.988.497	92,79	95,13	
	BELANJA PEGAWAI	4.932.825.550	4.576.988.497	92,79	95,13	
	BELANJA LANGSUNG	26.597.203.300	25.305.159.490	95,14	98,62	
1	PELAYANAN ADMINITRASI PERKANTORAN	8.693.099.440	8.628.943.775	99,26	99,90	
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000	4.500.000	90,00	90,00	
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	201.694.200	191.642.279	95,02	99,82	
	PENYEDIA JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.550.000	29.188.900	95,54	100,00	
	PENYEDIA JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.636.619.140	6.627.304.709	99,86	100,00	
	PENYEDIA JASA KEBERSIHAN KANTOR	10.217.100	10.213.400	99,96	100,00	
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	54.193.000	54.122.780	99,87	100,00	
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	68.525.000	68.493.850	99,95	100,00	
	PENYEDIAAN KOMPUNEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.885.000	7.871.007	99,82	100,00	
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21.600.000	18.720.000	86,67	98,00	
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	711.370.000	672.798.170	94,58	99,02	
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	649.196.000	648.088.281	99,83	100,00	
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	296.250.000	296.000.399	99,92	100,00	
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.936.113.780	2.896.687.223	98,66	100,00	
	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	1.725.300.000	1.708.400.000	99,02	100,00	
	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	156.276.000	151.155.600	96,72	100,00	
	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	12.985.000	12.934.400	99,61	100,00	
	PENGADAAN MEBELEUR	11.200.000	11.088.000	99,00	100,00	
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	303.544.000	301.434.134	99,30	100,00	
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	70.905.380	69.506.247	98,03	100,00	
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	210.353.400	201.100.752	95,60	100,00	
	REHABILITAS SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	71.920.000	71.918.090	100,00	100,00	
	REHABILITAS SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	373.630.000	369.150.000	98,80	100,00	

3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	36.000.000	35.650.000	99,03	100,00	
	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	36.000.000	35.650.000	99,03	100,00	
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	94.646.000	80.994.417	85,58	98,15	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	94.646.000	80.994.417	85,58	98,15	
5	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.165.678.180	5.953.063.184	96,55	99,09	
	PENYUSUNAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH	170.900.000	103.533.900	60,58	67,00	
	PEMELIHARAAN KEBERSIHAN KOTA	2.427.871.500	2.423.752.521	99,83	100,00	
	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN KOTA	1.994.100.000	1.910.750.000	95,82	100,00	
	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TPA	15.000.000	14.784.000	98,56	100,00	
	PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN TPA	1.557.806.680	1.500.242.763	96,30	100,00	
6	PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	30.000.000	27.803.950	92,68	100,00	
	PELAKSANAAN SAMPIT EXPO	30.000.000	27.803.950	92,68	100,00	
7	PENGENDALIAN PENCERMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	663.532.500	496.062.175	74,76	86,90	
	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN	88.930.000	1.613.000	1,81	2,25	
	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAAN LINGKUNGAN HIDUP	88.777.500	85.831.800	96,68	100,00	
	PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN	20.000.000	16.461.575	82,31	100,00	
	PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM KEPEDULIAN TERHADAP LH DI SEKOLAH	45.825.000	39.005.800	85,12	100,00	
	PENGADAAN PERALATAN UNTUK UJI KUALITAS AIR DAN PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM UNTUK UJI KUALITAS MERKURI (DAK)	420.000.000	353.150.000	84,08	100,00	
8	PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	71.810.000	37.782.286	52,61	78,88	
	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA	71.810.000	37.782.286	52,61	78,88	
9	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	204.871.600	200.353.001	97,79	100,00	
	OPERASIONAL LABORATORIUM	204.871.600	200.353.001	97,79	100,00	
10	PENGEMBANGAN EKOSWISATA DAN JASA LINGKUNGAN DI KAWASAN-KAWASAN KONSERVASI LAUT DAN HUTAN	1.252.150.000	1.185.145.000	94,65	100,00	
	PENGELOLAAN KHDTK KEBUN RAYA	1.252.150.000	1.185.145.000	94,65	100,00	
11	PEMBINAAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA SKPD	64.400.000	64.374.920	99,96	100,00	
	PEMBINAAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN APBD KABUPATEN	35.000.000	34.999.860	100,00	100,00	
	PELAPORAN KEGIATAN APBD KABUPATEN	29.400.000	29.375.060	99,92	100,00	
12	PENGELOLAAN DAN REHABILITAS EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT	43.577.000	29.200.000	67,01	92,78	
	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN REHABILITAS EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT	43.577.000	29.200.000	67,01	92,78	

13	PENGLOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	199.130.000	197.200.000	99,03	100,00	
	PENATAAN RTH	199.130.000	197.200.000	99,03	100,00	
14	PROGRAM PENYULUHAN DAN PENATAAN HUKUM/PERUNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	
	PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	
15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	131.480.000	76.406.190	58,11	86,59	
	REHABILITAS/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LIMBAH	131.480.000	76.406.190	58,11	86,59	
16	PROGRAM PENANAMAN BAMBU PADA KIRI KANAN SUNGAI, SEMPADAN DANAU DAN DAERAH TANGKAPAN AIR (DTA), SEKITAR MATA AIR DAN DAERAH IMBUNAN AIR TANAH (DBH-DR)	1.145.050.000	962.735.649	84,08	99,95	
	PENANAMAN BAMBU DI KANAN KIRI SUNGAI (DBH-DR)	1.145.050.000	962.735.649	84,08	99,95	
17	PROGRAM PENGADAAN PEMBANGUNAN KONSERVASI TANAH DAN AIR (DBH-DR)	603.050.000	543.567.480	90,14	100,00	
	PEMBUATAN BANGUNAN KONSERVASI TANAH DAN AIR (DBH-DR)	603.050.000	543.567.480	90,14	100,00	
18	PENANAMAN POHON PADA LAHAN DI LUAR KAWASAN (DBH-DR)	2.856.164.800	2.558.868.265	89,59	99,96	
	PEMBIBITAN (DBH-DR)	2.856.164.800	2.558.868.265	89,59	99,96	
19	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN (DBH-DR)	1.360.950.000	1.297.821.975	95,36	100,00	
	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (DBH-DR)	1.360.950.000	1.297.821.975	95,36	100,00	
20	PROGRAM PENGHIJAUAN	45.500.000	32.500.000	71,43	93,96	
	PEMBIBITAN DAN KONSERVASI TANAMAN PENGHIJAUAN	45.500.000	32.500.000	71,43	93,96	
	JUMLAH	31.530.028.850	29.882.147.987	95,14	98,62	

BAB. IV PENUTUP



A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 ini memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang pembangunan lingkungan hidup. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin.

Pada Anggaran Tahun 2019 ini berdasarkan Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Timur mencapai 86,58 % termasuk dalam kategori **BERHASIL**.

Secara umum dari total pagu anggaran tahun 2019 yaitu sebesar Rp 31.530.028.850,- dengan perincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.932.825.550,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 26.597.203.300,- terealisasi sebesar Rp. 29.882.147.987,- (fisik 98,62 %).

B. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan dan kendala teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur, antara lain :

1. Akurasi data dan informasi Lingkungan hidup belum sampai pada tingkat detail untuk Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kinerja masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Perlu ditingkatkan penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pengelolaan pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup.

3. Perlunya koordinasi semua pihak dalam rangka penanganan kasus-kasus lingkungan serta penegakan hukum lingkungan.
4. Ketersediaan Lahan/tanah Aset Pemerintah Kabupaten yg dapat digunakan sebagai tempat pembangunan wadah sampah besar rumah tangga (DEPO) yang merupakan sarana/fasilitas pendukung yang memadai dalam pengelolaan persampahan.

Pada tahun mendatang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur akan melakukan berbagai langkah pembenahan maupun perbaikan demi terwujudnya pembangunan lingkungan hidup yang lebih optimal, dengan harapan anggaran kegiatan yang sifatnya teknis Lingkungan dapat disediakan demi tercapai dan terlaksananya sasaran strategis sehingga kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur meningkat sesuai apa yang kita inginkan bersama.

Kiranya Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin, Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.